

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan Hasil Revisi Ujian Komprehensif</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>Abstract</b>	<b>vii</b>
<b>Intisari</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	14
F. Batasan Operasional	21
G. Kerangka Konseptual	24
H. Metode Penelitian	26
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah	39
1. Perubahan Sistem Sentralisasi ke Desentralisasi	39
2. Perubahan Sistem Perwakilan ke Pemilihan Langsung	46
3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Serentak	68
4. Calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak	81
5. Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Calon Tunggal	84
6. Mekanisme Pengusungan Calon Kepala Daerah	91
a. Peran Partai Politik	93
b. Pengusungan Calon oleh Partai Politik	102
c. Calon Perseorangan	109
B. Sistem Pemerintahan Daerah	

1. Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah	126
2. Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah	128
3. Kedudukan dan Fungsi DPRD	129
4. Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah	136
<b>C. Sistem Pengawasan DPRD</b>	
1. Fungsi Pengawasan	148
2. Sifat Pengawasan	157
3. Instrumen Pengawasan	160
4. Objek Pengawasan	169
a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan <i>(control of policy making)</i>	169
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah <i>(control of policy executing)</i>	169
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pemerintahan daerah	171
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah	172
 <b>BAB III : LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Demokrasi	177
B. Teori Pemilu Demokratis	194
C. Teori Pengawasan	198
D. Teori <i>Checks and Balances</i>	208

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Munculnya Pilkada Calon Tunggal   | 215 |
| 1.1 Periode Penyelenggaraan Pilkada Serentak                                 | 215 |
| 1.2 Awal Calon Tunggal   | 221 |
| 2. Beberapa fenomena dalam perkembangan Pilkada Calon Tunggal                | 230 |
| 2.1 Peningkatan jumlah partai politik pengusung                              | 230 |
| 2.2 Dominasi calon petahana ( <i>Incumbent</i> )                             | 234 |
| 2.3 Minim partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan.              | 238 |
| 2.4 Terdapat bakal/calon pesaing yang gagal                                  | 243 |
| 2.5 Koalisi partai politik bersifat pragmatis                                | 246 |
| 3. Calon Tunggal di Kabupaten Pati dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.        |     |
| 3.1 Calon Tunggal di Kabupaten Pati  | 252 |
| 3.2 Calon Tunggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat                           | 277 |
| 4. Faktor-faktor pendorong lahirnya calon tunggal dengan dukungan mayoritas. | 294 |

## **B. Dukungan partai politik atas calon tunggal dan dampaknya terhadap pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD.**

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Urgensi Fungsi Pengawasan DPRD   | 328 |
| 2. Korelasi dukungan partai politik atas calon kepala daerah terhadap fungsi pengawasan DPRD.   | 330 |
| 3. Penggunaan instrumen pengawasan oleh DPRD Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum dan setelah pelaksanaan Pilkada calon tunggal. | 335 |

4.	Pengaruh dukungan mayoritas partai politik atas calon tunggal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.	336
4.1	Perbandingan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Pati sebelum dan setelah Pilkada calon tunggal.	338
4.2	Perbandingan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum dan setelah Pilkada calon tunggal.	418
<b>C. Penataan regulasi Pilkada guna mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif.</b>		488
1.	Penataan mekanisme rekrutmen bakal calon	
1.1	Rekrutmen bakal calon oleh partai politik	489
1.2	Rasionalisasi syarat partai pengusung	495
1.3	Rasionalisasi persyaratan calon perseorangan	497
2.	Penataan mekanisme pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah oleh partai politik	
2.1	Pembentukan koalisi partai pengusung	504
2.2	Pembatasan besaran koalisi	506
2.3	Desentralisasai kewenangan Partai Politik.	508
3.	Penataan Pilkada calon tunggal	510
3.1	Disain surat suara.	510
3.2	Metode pemberian suara	513
3.3	Memperkuat legitimasi calon terpilih.	515
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan	523
B.	Saran	525

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN